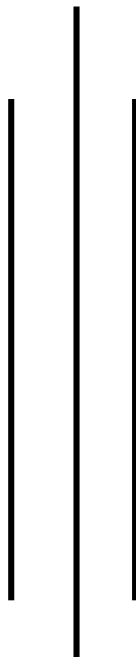


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU UTARA
RESOR TERNATE



RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN RESOR TERNATE TAHUN 2020-2024



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TERNATE
NOMOR: KEP/ /IX/2020, TANGGAL, SEPTEMBER 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi untuk menjalankan pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban Negara. Tugas utama dari Kepolisian Republik Indonesia adalah menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat .Untuk bisa menyelenggarakan tugas tersebut dengan baik, Kepolisian Negara Republik Indonesia memerlukan berbagai macam sumber daya yang memadai , salah satunya adalah unsur penegak hukum disetiap daerah / wilayah seluruh Indonesia. Polres Ternate sebagai unsur pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia didaerah wilayah hukum Polda Maluku Utara memiliki peran untuk melayani. Melindungi, dan juga mengayomi masyarakat khususnya didaerah wilayah hukum Kota Ternate.

Dalam upaya memenuhi tugas pokok dan menjalankan peran – perannya , Polres Ternate perlu memiliki pedoman agar dapat mencapai tujuan – tujuan yang diinginkan , dengan begitu Polres Ternate merumuskan , menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Polres Ternate. Rencana Strategis ini merupakan pedoman yang akan dijadikan acuan selama lima tahun kedepan oleh Polres Ternate dalam rangka mencapai visi dan mengimplementasikan misi dengan tujuan dan sasaran strategis , serta arah kebijakan dengan indikator – indikator pengukurnya.

Rencana Strategis Polres Ternate periode 2020-2024 adalah penjabaran yang rinci dari Rencana Strategis Polda Maluku Utara Tahun 2020-2024 yang didasari dari grand Strategi Polri 2005-2025, yang pada saat ini sudah memasuki tahap akhir yaitu excellence, dimana sebelumnya Polri mengarah untuk menjadi lembaga yang profesional , modern dan terpercaya. Polres Ternate telah melampaui berbagai macam capaian yang sudah ditentukan pada rencana Strategis periode sebelumnya, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan .

Sebagai kepingan terakhir dan Grand Strategi Polri 2005-2025, Rencana Strategis Polres Ternate periode 2020-2024 menekankan peran Satuan Wilayah dalam mendukung Polri menyelenggarakan fungsi pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban , Berdasarkan visi tersebut maka Rencana Strategis Polres Ternate dirumuskan dan disusun berdasarkan kondisi umum Polres Ternate , yang meliputi berbagai elemen seperti capaian kinerja Polres Ternate dari Rencana Strategis sebelumnya dan isu strategis yang sedang dan dihadapi oleh Polres Ternate.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....
DAFTAR ISI.....
BAB I PENDAHULUAN.....
1. Kondisi Umum.....
2. Capaian Kinerja Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2019.....
a. Peningkatan Pelayanan Prima Kepolisian.....
b. Situasi dan Kondisi Kamtibmas yang kondusif.....
c. Penegakkan Hukum.....
d. Aparatur Polres Ternate yang Profesional , Unggul dan Terpercaya....
3. Potensi dan Permasalahan.....
a. Potensi gangguan Keamanan.....
b. Analisa SWOT.....
c. Potensi dan Permasalahan.....
BAB II VISI,MISI,TUJUAN, DAN SASARAN.STRATEGIS.....
1. Visi.....
2. Misi.....
3. Tujuan.....
4. Sasaran Strategis.....
5. Hubungan Keterkaitan Sasaran Impact, Tujuan dan Sasaran.....
6. Pentahapan kebajikan.....
BAB III ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....
1. Arah Kebijakan dan Startegi Polda Maluku Utara.....
2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Ternate.....
3. Kerangka Regulasi.....
4. Kerangka Kelembagaan.....
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....
1. Target Kinerja.....
2. Kerangka Pendanaan.....
BAB V PENUTUP.....
1. Kaidah Pelaksana.....
2. Autentifikasi dan Distribusi.....

**RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA
RESOR TERNATE
TAHUN 2020 - 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Kondisi Umum

Di dalam disiplin ilmu manajemen, perencanaan merupakan suatu hal yang sangat vital dalam menentukan arah dan tujuan, baik itu arah dan tujuan suatu hal yang bersifat sementara maupun suatu hal yang keberadaannya bersifat berkelanjutan, seperti misalnya organisasi. Setiap organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun swasta pasti memiliki rencana untuk masa depan, walaupun bentuk perencanaannya tentu saja akan berbeda. Khusus untuk organisasi pemerintah, organisasi-organisasi yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat perencanaan yang disebut Rencana Strategis. Rencana Strategis (selanjutnya disebut Renstra) merupakan suatu dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang memiliki kedudukan yang strategis dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut SPPN). Substansi dari Renstra ini pun secara garis besar akan sama di setiap organisasi pemerintahan, karena memang ketentuan terkait formil dan materiil dari Renstra telah ditetapkan oleh pusat, yakni berisikan Visi, Misi, Sasaran Strategis, Arah Bijak, Strategi, Indikator Kinerja, termasuk namun tidak terbatas pada anggaran. Dalam penyusunannya, Renstra Kementerian/Lembaga berkedudukan sebagai penjabaran dari RPMJN,

Sehingga dari seluruh Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN dapat mengalir kedalam setiap Renstra Kementerian/Lembaga serta visi dan misi Presiden.

Sebagai organisasi yang merupakan alat negara yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang keamanan, Polisi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) tentu saja juga diwajibkan untuk menyusun Renstranya tersendiri untuk menurunkan langkah-langkah strategis dalam RPJMN yang saat ini telah memasuki tahap ke IV serta menyesuaikan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Maluku Utara agenda pembangunan nasional sebagai mana tercantum dalam RPJMN, Polri telah menetapkan 4 (empat) tahapan Renstra Polri yang meliputi: Renstra Tahap I untuk Tahun 2005-2009, berfokus membangun kepercayaan masyarakat atau *trust building*, Renstra Tahap II Tahun 2010-2014 berfokus membangun kemitraan atau *partnership building* dan Renstra Tahap III Tahun 2015-2019 berfokus memberikan pelayanan unggul atau *strive for excellence*. Saat ini, Polri berada pada tahapan selanjutnya yaitu penyusunan Renstra Tahap IV yang berfokus pada mempertahankan status sebagai organisasi yang unggul (*excellence*). Selanjutnya, Renstra Polri ini akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Polri, dan juga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Polri.

Sebagai Satuan Pelaksana Kewilayahan yang tidak terpisahkan dari Polda, sudah sewajarnya Kepolisian Resor Ternate (selanjutnya disebut Polres Ternate juga menyusun Renstra yang secara formil tidak jauh berbeda dengan Renstra Polda Maluku. Namun perlu diingat bahwa dengan keunikan demografis, topografis, dan geografis, maka Renstra Polres Ternate akan berbeda secara materiil dengan Renstra Polda Maluku, menyesuaikan dengan lingkungan strategis Wilayah Ternate. Renstra Polres Ternate ini di kemudian hari harus dipedomani secara sungguh-sungguh.

Upaya Polres Ternate untuk menegakkan hukum dan menjaga serta memelihara keamanan dan ketertiban pada praktiknya tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sekalipun Polres Ternate memiliki potensi yang luas, hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Polres Ternate dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu akan selalu ada mengingat lingkungan strategis yang selalu berubah seiring berjalannya waktu. Potensi-potensi yang dimiliki oleh Polres

Ternate serta hambatan apa saja yang dihadapi oleh Polres Ternate akan dibahas lebih lanjut di Bab I dokumen Renstra ini. Namun sebelum membahas potensi dan permasalahan, akan dibahas terlebih dahulu terkait capaian apa saja yang telah direalisasikan oleh Polres Ternate pada Renstra periode sebelumnya, yakni periode 2015-2019.

1. Capaian Kinerja Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2019

Untuk dapat menyusun rencana Strategis Polres Ternate sebagai satuan pelaksana kewilayahan, dituntut untuk bekerja dan berkinerja maksimal dalam menghasilkan output yang sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya. Untuk dapat melihat kemajuan/perkembangan kinerja organisasi, maka dibutuhkan penyusunan Renstra Polres Ternate 2020-2024 ini juga harus mendasari capaian-capaian kinerja pada Renstra Polres Ternate periode 2015-2019 berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Polda Maluku Utara tahun 2019. Terkait hal tersebut, ditetapkan 4 (Empat) Sasaran Strategis serta 14 (Empatbelas) Indikator Kinerja yang tentunya digunakan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Polres Ternate sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara dan juga untuk mengukur pencapaian dari Polres Ternate. Capaian Indikator Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana capaian kinerja (target) dengan realisasi capaian kinerja pada Pengukuran Kinerja (PK) Polres Ternate

a. Peningkatan Pelayanan Prima Kepolisian

Salah satu capaian Polres Ternate di Tahun 2018 sampai Tahun 2020 yang patut diapresiasi yakni meraih Predikat Zona Integritas dan predikat Pelayanan Public terbaik yang merupakan program Polri dalam rangka meningkatkan modernisasi dalam layanan publik yang didukung oleh teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat.



PROFESIONAL . MODERN . TERPECAYA **BEKERJA . MENGABDI . BERMAHALA**

POLRES TERNATE RAIH PENGHARGAAN PENYELENGGA PELAYANAN DENGAN KATEGORI "BAIK" TAHUN 2019 DARI KEMENPAN RB-RI

HUMAS POLRES TERNATE  [HUMASRESTERNATE](#)  [HUMASRESTERNATE](#)  [@HUMASRESTTE](#)  [HUMAS POLRES](#)





Penghargaan tersebut didapatkan dari komitmen yang kuat Polres Ternate untuk memberikan Pelayanan yang prima kepada masyarakat. Polres Ternate harus dapat memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sebagai wujud pemberian Polres Ternate sudah lebih cepat, tidak diskriminatif, dan setiap petugas yang melayani sudah menguasai tupoksi. Oleh karena itu, kinerja Polres Ternate dalam mewujudkan Pelayanan prima kepolisian diarahkan pada indikator, **Peningkatan Kepuasan Masyarakat Pengguna Pelayanan Publik Kepolisian Berdasarkan Hasil Analisa dan Evaluasi. Predikat ZI dan Pelayanan Public dengan kategori Baik** tersebut merupakan pengusulan dari Polda Maluku Utara ke Kementerian Reformasi Birokrasi.

b. Situasi dan Kondisi Kamtibmas yang Kondusif

Polri merupakan institusi pemerintah yang tugas pokoknya adalah melaksanakan penegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat. Untuk mendukung berjalannya setiap kegiatan dengan baik, organisasi memerlukan fungsi-fungsi yang memiliki ciri khas masing-masing. Setiap fungsi yang terbentuk kemudian harus berintegrasi untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal perwujudan situasi dan Kondisi yang Kondusif terbebas dari gangguan Kamtibmas, diperlukan koordinasi yang baik

dari fungsi-fungsi kepolisian seperti Intelkam, Binmas, Reskrim, Samapta, dan Lantas. Beberapa fungsi kepolisian tersebut merupakan fungsi yang dalam pelaksanaan kerjanya berkaitan langsung dengan keadaan aktual di lapangan.

Isu-isu terkait keamanan dan ketertiban dan potensi permasalahan harus dapat diteliti dengan tepat sehingga setiap potensi gangguan yang terdeteksi dapat ditangani melalui pendekatan preventif sehingga tidak beres kalas menjadi gangguan nyata. Dalam hal penciptaan Situasi dan Kondisi yang Kondusif terbebas dari gangguan Kamtibmas, Polres Ternate menetapkan 7 (tujuh) indikator antara lain:

1) Persentase Meningkatnya Partisipasi Komunitas Dalam Masyarakat Guna Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Sekitar.

Merujuk pada data di tahun 2019 target sebesar 25% atau 20 komunitas dari total jumlah komunitas pada tahun 2018 sebanyak 22 komunitas dengan capaian kinerja sebesar 27%, sehingga pencapaian kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, artinya kesadaran dalam meningkatkan partisipasi komunitas dalam masyarakat guna pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya masih lemah.

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam Meningkatnya partisipasi komunitas dalam masyarakat guna pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya adalah masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan kenyamanan terhadap lingkungan sekitarnya.

Dalam indikator ini, tentunya dibutuhkan giat-giat terkait pengelolaan komunitas dalam masyarakat guna pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan. Berkaca dari kendala-kendala yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan, Polres Ternate melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi hal-hal tersebut, seperti: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.

2) Persentase penyelesaian permasalahan Kamtibmas di tingkat desa oleh Bhabinkamtibmas

Pada tahun 2019 target yang ditetapkan Polres Ternate untuk indicator ini adalah sebesar 25%, dengan realisasi sebesar 100%, dan capaian sebesar 400%. Hal ini mengindikasikan bahwa Polres Ternate dapat menyelesaikan semua permasalahan dengan baik dan tuntas.

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam Meningkatnya persentase penyelesaian permasalahan Kamtibmas di tingkat desa oleh Bhabinkamtibmas adalah tidak adanya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan Kamtibmas di tingkat desa oleh Bhabinkamtibmas dikarenakan semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas.

Usulan pemecahan masalah untuk Meningkatnya persentase penyelesaian permasalahan Kamtibmas di tingkat desa oleh Bhabinkamtibmas adalah tidak ada untuk usulan pemecahan masalah dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan Kamtibmas di tingkat desa oleh Bhabinkamtibmas dikarenakan semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas.

3) Persentase Penurunan Jumlah Korban Laka Lantas.

Target yang ditetapkan Polres Ternate untuk indicator ini adalah sebesar 40%, dengan realisasi sebesar 82%, dan capaian sebesar 48%. Lebih spesifik, Tahun 2018 jumlah Laka sebesar 17 dengan korban meninggal 12 orang, luka berat 3 orang dan luka ringan 2 orang. Sedangkan, pada tahun 2019 sebesar 14 dengan rincian korban laka lantas yang meninggal dunia 11 orang, korban laka lantas yang luka berat 1 orang dan korban laka lantas yang luka ringan sebesar 1 2 orang. Data data diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4) **Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Laka Lantas.**

Pada tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar 40%, dengan realisasi sebesar 55%, dan capaian sebesar 137%. Lebih spesifik, jumlah pelanggaran sebesar 14.039. dengan tilang pelanggar sebanyak 14.039 orang. Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Peningkatan jumlah pelanggar yang diberikan sanksi tilang ataupun yang sanksi teguran. Disisilain, pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hokum Polres Ternate didominasi pelanggaran dalam hal kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan penggunaan helm. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yang mengakibatkan capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalulintas serta kurangnya personel lalu lintas.

5) **Persentase Penurunan Jumlah fatalitas korban Laka Lantas yang Meninggal Dunia**

Pada tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar 35%, dengan realisasi sebesar 91%, dan capaian sebesar 38%. Lebih spesifik, jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2018 adalah 12 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 11 orang.. Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

c. **Penegakkan Hukum**

Kegiatan penegakkan hukum merupakan suatu bentuk aktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan bingkai (*framework*) yang telah ditetapkan oleh suatu Undang-undang atau Hukum. Dalam rangka melaksanakan tugas penegakkan hukum, polri sebagai salah satu institusi penegak hukum harus mampu mewujudkan ketertiban dan memberikan rasa adil & aman kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi di Polri, di tahun 2019 Polres Ternate menetapkan 4 (Empat) indikator dalam rangka memastikan penegakkan hukum, diantaranya adalah: Persentase peningkatan pengungkapan dan

Dalam upaya mencapai target dari sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) program di lingkungan Polres Ternate, antara lain:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
3. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
4. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

2. Kerangka Pendanaan

Dalam upaya mengimplementasikan arah kebijakan, strategi, serta dalam upaya mencapai target sasaran utama yang telah ditetapkan, dukungan kerangka pendanaan yang memadai sangat dibutuhkan oleh Polres Ternate. Pendanaan yang dimaksud akan bersumber dari pemerintah (Rupiah Murni (RM)), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU). Dana yang terkumpul akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Ternate. Secara terperinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Ternate	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan Penguatan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Polres Ternate ➤ Melakukan pembangunan Polsek dan/atau pos-pos pengamanan secara bertahap. ➤ Meningkatkan keamanan perairan melalui penguatan Polsek wilayah pantai. ➤ Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polres 	RM PNBP	

SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Ternate yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas. ➤ Memperkuat program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan. ➤ Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horisontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan. ➤ Meningkatkan kemampuan penanganan radikalisme, dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif. ➤ Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik. ➤ Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Samapta. ➤ Menghadirkan anggota Polres Ternate di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat. 		

SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian <i>trouble spot</i> dan <i>black spot</i> dalam mengurangi titik-titik lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas. ➤ Melakukan kajian <i>black spot</i> kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas. ➤ Penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan pemanfaatan teknologi <i>Traffic Accident Analysis</i>. ➤ Mengembangkan program <i>road safety/safety ridding</i>. ➤ Membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan. ➤ Menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis. ➤ Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas. 		
<p>Penegakkan hukum secara berkeadilan di wilayah hukum Polres Ternate</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik. ➤ Meningkatkan kapabilitas Polres dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, BPK, BPKP, PPATK dan Stakeholder lainnya. 	<p>RM PNBP</p>	

SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelaksanaan penyidikan secara ilmiah, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. ➤ Mengembangkan kemampuan penyidikan secara ilmiah penyidik sampai dengan tingkat Polsek ➤ Meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah. ➤ Meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah. ➤ Meningkatkan koordinasi antar satker dalam upaya percepatan penanganan kasus. 		
Profesionalisme SDM Polres Ternate	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/Polres. ➤ Membuat <i>Blue Print/road maps</i> kebutuhan minimal standard pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan). ➤ Menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan 	RM PNBP	

SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>perlengkapannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polres dan Polsek ➤ Meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait. ➤ Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan. ➤ Meningkatkan fasilitas kesehatan Polres 		
Modernisasi teknologi Polres Ternate	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polres dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal. ➤ Membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel. 	RM PNBP	
Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung Tata kelola Pemerintahan Yang Bersih	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan Revolusi Mental, khususnya mengembangkan budaya anti korupsi internal Polres, 	RM PNBP	

SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Terbuka dan Melayani	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran. ➤ Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program <i>quick wins</i>. ➤ Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan publik kepolisian. ➤ Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. ➤ Meningkatkan pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> a. penggelaran Satpas online; b. penggelaran sistem STNK online; ➤ Membangun sistem pelayanan publik secara <i>online</i> dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan/ pemberitahuan kegiatan masyarakat ➤ Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa. ➤ Meningkatkan kemampuan personel Polri dan satuan dan sarana prasarana. 		

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Polres Ternate Tahun 2020 - 2024 merupakan suatu perencanaan jangka menengah Polres Ternate, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polres Ternate dalam mendukung agenda pembangunan Nasional.

Rencana Strategis ini merupakan dokumen hidup yang perlu direvisi secara rutin dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh satker dan personel Polres Ternate sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polres Ternate Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban Nasional dapat terpelihara.

1. Kaedah Pelaksana

- a. Mengutamakan system pelayanan publik kepolisian yang prima dengan menghadirkan Negara (Polisi) ketengah – tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. Pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai *civilian police* menuju *democratic policing*;
- c. Perkembangan kedepan, perlu dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalkan jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
- d. Selalu membangun kemitraan melalui system sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan local lainnya, sebagai implementasi strategi Polmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentifikasi dan distribusi.

- a. Autentifikasi Renstra Polres Ternate berikut merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang telah disahkan oleh Kapolres sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;

- b. Distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh Satker dan jajaran Polres Ternate untuk dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggungjawab program guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : September 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TERNATE

ADITYA LAKSIMADA, S.IK
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77030897